

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2018





ELJASER YENTJI SUNUR, ST., MT

BUPATI LEMBATA

**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2018**



DR. THOMAS OLA, SE., M.SI

WAKIL BUPATI LEMBATA

Masyarakat Kabupaten Lembata yang Kami cintai, Kami hormati dan Kami banggakan...

Pada kesempatan yang berbahagia ini, iijinkan kami menyampaikan terima kasih atas segala dukungan dan partisipasinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembanguna dan pembinaan kemasyarakatan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Lembata tahun 2018 dibingkai dalam kemasan visi pembangunan lima tahun yakni ***"Terwujudnya Lembata yang Produktif dan Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan"***.

Adapun progress penyelenggaraan pemerintahan perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat sebagai wujud dari akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, iijinkan kami menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 sebagai berikut:

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

1. Produk Domestik Regional Bruto

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.589.011,190,-. Terjadi peningkatan sebesar 8.40 % dari tahun 2016 sebesar Rp.1.465.790,930,-. Adapaun peningkatan PDRB berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**PDRB Kabupaten Lembata Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2017 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	426.191,06	471.120,68	506.706,92	549.510,26
B	Pertambangan dan Penggalian	5.582,41	6.255,64	7.119,04	7.552,25
C	Industri Pengolahan	2.504,91	2.808,01	3.114,98	3.396,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	640,72	859,77	1.198,99	1.379,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	458,09	490,34	527,42	546,85
F	Konstruksi	79.042,01	88.705,32	104.198,00	115.251,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	79.887,84	91.733,99	104.989,82	113.796,22
H	Transportasi dan Pergudangan	32.897,64	36.696,74	40.040,19	42.430,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.737,10	3.176,44	3.571,63	3.936,28
J	Informasi dan Komunikasi	86.486,35	91.449,68	98.560,54	104.851,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.986,68	5.415,62	6.034,63	6.491,76
L	Real Estate	19.854,28	22.394,27	24.877,93	26.529,83
M,N	Jasa Perusahaan	848,93	947,01	1.036,74	1.121,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	342.199,17	376.451,76	417.205,28	453.049,97
P	Jasa Pendidikan	89.938,14	99.335,28	108.338,64	117.521,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17.792,70	19.659,34	22.208,44	24.091,35
R,S, T,U	Jasa lainnya	13.376,63	14.614,45	16.061,86	17.553,35
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.205.424,66	1.332.113,33	1.465.790,93	1.589.011,19

*: Angka Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2018

Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2017 sebesar Rp.1.057.210.440.000,-. Terjadi peningkatan sebesar 5.03% dari tahun 2016 sebesar Rp. 1.006.506.580,-. Gambaran kontribusi persektor sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

**PDRB Kabupaten Lembata Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 (Juta Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	317,697.70	328,971.64	334,908.87	351,399.72
B	Pertambangan dan Penggalian	4,192.77	4,445.53	4,888.70	5,260.11
C	Industri Pengolahan	1,949.01	2,048.81	2,148.01	2,269.29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	742.13	854.61	970.07	981.39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	371.31	384.89	394.72	401.19
F	Konstruksi	58,011.80	61,053.94	66,891.56	72,476.82
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	58,889.67	63,141.71	67,859.19	71,105.37
H	Transportasi dan Pergudangan	27,299.54	29,259.67	30,231.20	31,584.10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Mnum	2,115.06	2,268.93	2,391.55	2,588.59
J	Informasi dan Komunikasi	74,730.28	79,297.63	84,892.58	89,822.72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,693.17	3,819.29	4,097.82	4,316.15
L	Real Estat	15,063.46	15,888.15	16,515.52	17,286.92

M,N	Jasa Perusahaan	641.82	674.65	699.61	715.04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	260,500.64	275,358.77	292,097.72	304.976,02
P	Jasa Pendidikan	65,110.66	68,177.52	70,999.30	73.951,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,831.51	14,383.51	15,288.38	16.149,55
R,S, T,U	Jasa Lainnya	10,828.27	10,828.27	11,231.77	11.926,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		915,268.57	960,857.53	1,006,506.58	1.057.210,44

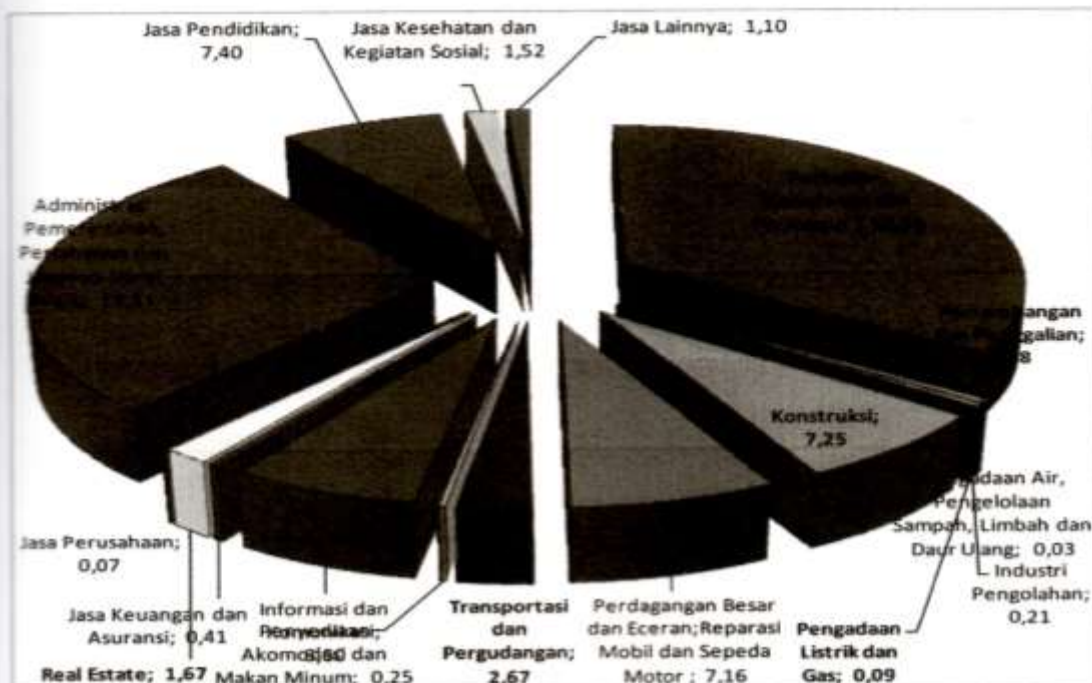
*) : Angka Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2018

2. Distribusi PDRB / Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Lembata dapat dilihat dari kontribusi masing masing sektor ekonomi seperti pada grafik :

Struktur Ekonomi



Struktur perekonomian Kabupaten Lembata pada tahun 2017 masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yang memberikan sumbangannya sebesar 34,58%. Diikuti oleh lapangan usaha sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sebesar 28,51%. Sedangkan nilai distribusi dari lapangan usaha lainnya masih sangat kecil. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga dalam rangka menumbuhkan ekonomi, perlu transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke tersier.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2017 adalah

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,75%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Laju Pertumbuhan Ekonomi per Tahun

No	Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)
3	2014	5,09
4	2015	4,98
5	2016*	4,75
6	2017**	5,04

*) Angka Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2018

Selanjutnya pada tabel laju pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing lapangan usaha. Beberapa lapangan usaha ekonomi PDRB mencapai pertumbuhan yang positif pada tahun 2017. Tiga lapangan usaha dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2016 yaitu lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,35%; diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,24%; serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,60%. Sedangkan tiga lapangan usaha dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,17%, kemudian lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah sebesar 1,64%, dan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 2,21%. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2014-2017

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.81	3.53	1.37	4.92
B	Pertambangan dan Penggalian	4.86	6.03	9.97	7.60
C	Industri Pengolahan	3.30	4.89	4.84	5.65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.38	9.61	14.67	1.17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.93	6.66	2.56	1.64
F	Konstruksi	5.99	5.24	7.32	8.35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.26	7.22	3.32	4.78
H	Transportasi dan Pergudangan	8.05	7.01	5.40	4.48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Mnum	5.21	7.28	7.06	8.24
J	Informasi dan Komunikasi	7.28	6.11	7.06	5.81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.66	6.72	7.03	5.33
L	Real Estat	6.82	5.47	3.95	4.67
M,N	Jasa Perusahaan	2.80	5.12	3.70	2.21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.91	5.80	6.08	4.41
P	Jasa Pendidikan	9.48	4.69	5.84	4.16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.00	3.99	6.29	5.63
R,S,T, U	Jasa Lainnya	2.14	3.84	3.73	6.18
	Produk Domestik Regional Bruto	5.09	4.98	4.71	5.04

*) : Angka Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2018

4. PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita Kabupaten Lembata tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Lembata Tahun 2017

No	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per Kapita
			Realisasi
1.	Rp.1.589.011,190,-	140.350	11.321.775

Sumber Data: Diolah dari Lembata dalam Angka Tahun 2018

L RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Pada tahun anggaran 2018 penyelenggaraan ke-6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Lembata dilaksanakan oleh 9 Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam 96 Program dan 273 Kegiatan. Adapun total alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 231.549.237.685,00 dengan realisasi keuangan menurut SPJ sebesar Rp. 204.306.405.077,00 atau mencapai 88,23%. Sedangkan alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 180.991.379.438,00 dengan realisasi keuangan menurut SPJ sebesar Rp. 174.461.740.151,00 atau mencapai 96,39% dengan tingkat capaian pelaksanaan program/kegiatan urusan sebesar 98,47%. Gambaran pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PENDIDIKAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 11 program dan 49 kegiatan, dengan capaian kinerja 100%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran berdasarkan APBD-P T.A. 2018 sebesar Rp. 157.257.701.548,00 dengan realisasi Rp. 150.549.112.823,00 atau 95,73%.

2. KESEHATAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 29 program dan 88 kegiatan, dengan capaian kinerja 92,24%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp. 144.207.182.448,00 dengan realisasi Rp. 124.748.413.185,00 atau 86,51%.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 17 program dan 36 kegiatan, dengan capaian kinerja 100%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.80.130.966.802,00 dengan realisasi Rp. 75.153.922.688,00 atau 93,79%.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Pelaksana urusan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Kesehatan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 9 program dan 23 kegiatan, dengan capaian kinerja 98,59%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.12.241.971.692,00 dengan realisasi Rp. 12.026.914.045,00 atau 98,24%.

5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 12 program dan 31 kegiatan, dengan capaian kinerja 99,98%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.5.599.118.695,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.383.160.230,00 atau 96,14%.

6. SOSIAL

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 18 program dan 46 kegiatan, dengan capaian kinerja 100%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp. 13.190.575.938,00 dan realisasi Rp. 10.993.522.257,00 atau 83,34%.

7. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Pada tahun anggaran 2018 penyelenggaraan ke-17 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Lembata dilaksanakan oleh 15 Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam 104 Program dan 245 Kegiatan. Adapun total alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 38.913.517.210,00 dengan realisasi keuangan menurut SPJ sebesar Rp. 33.445.368.119,00 atau mencapai 85,95%. Sedangkan alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.756.985.537,00 dengan realisasi keuangan menurut SPJ sebesar Rp. 18.231.462.364,00 atau mencapai 97,20% dengan tingkat capaian pelaksanaan program/kegiatan urusan wajib sebesar 93,28%. Gambaran pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. TENAGA KERJA

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 3 program dan 3 kegiatan, dengan capaian kinerja 100%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp. 84,980,600.00 dan realisasi Rp. 78,427,100.00 atau 92,29%.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 3 program dan 3 kegiatan, dengan capaian kinerja 93,33%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp. 201,531,100.00 dan realisasi Rp. 201,228,560.00 atau 99,85%.

3. PANGAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 2 program dan 7 kegiatan, dengan capaian kinerja 99,09%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp. 462,205,100.00 dan realisasi Rp. 443,543,880.00 atau 95,96%.

4. PERTANAHAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Perumahan Rakyat

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan dengan capaian kinerja 75%

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp. 1.630.858.200,00 dan realisasi Rp. 447.906.760,00 atau 27,46%

5. LINGKUNGAN HIDUP

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Lingkungan Hidup

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 13 program dan 29 kegiatan dengan capaian kinerja 97,69%

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.4.438.546.405,00 dan realisasi Rp. 4.092.055.978,00 atau 92,19%

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 8 program dan 25 kegiatan dengan capaian kinerja 100%

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.1.870.749.553,00 dan realisasi Rp. 1.855.094.263,00 atau 99,16%

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 5 program dan 9 kegiatan dengan capaian kinerja 100%

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.1709.033.125,00 dan realisasi Rp. 706.090.995,00 atau 99,59%

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Kesehatan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 15 program dan 27 kegiatan dengan capaian kinerja 70,31%

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.5.344.939.786,00 dan realisasi Rp. 4.948.180.527,00 atau 92,58%

9. PERHUBUNGAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 4 program dan 7 kegiatan dengan capaian kinerja 100%

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.4.925.913.500,00 dan realisasi Rp. 4.734.649.689,00 atau 96,12%

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 10 program dan 26 kegiatan dengan capaian kinerja 74,48%

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.5.326.693.048,00 dan realisasi Rp. 5.206.893.929,00 atau 97,75%

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 11 program dan 23 kegiatan dengan capaian kinerja 90,82%

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.1.479.358.231,00 dan realisasi Rp. 1.416.168.145,00 atau 95,73%

12. PENANAMAN MODAL

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Penanaman Modal, Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 8 program dan 26 kegiatan dengan capaian kinerja 93,75%

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.936.370.124,00 dan realisasi Rp. 821.203.067,00 atau 87,70%

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 3 program dan 4 kegiatan dengan capaian kinerja 98,86%

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.5.526.049.177,00 dan realisasi Rp. 5.443.531.275,00 atau 98,51%

14. STATISTIK

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

~~Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana~~
dan Informatika

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.62.666.800,00 dan realisasi Rp. 62.585.690,00 atau 99,87%

15. KEBUDAYAAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 8 program dan 24 kegiatan dengan capaian kinerja 81,06%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.2.061.001.700,00 dan realisasi Rp. 1.838.631.755,00 atau 89,21%.

16. PERPUSTAKAAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan dengan capaian kinerja 97,14%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.2.898.408.616,00 dan realisasi Rp. 457.076.306,00 atau 15,77%.

17. KEARSIPAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan terdiri dari 8 program dan 25 kegiatan dengan capaian kinerja 97,31%.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan APBD-P TA. 2018 sebesar Rp.867.312.145,00 dan realisasi Rp. 787.338.600 atau 90,78%.

IV. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

1. HASIL EPPD ATAS LPPD KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2017 (Nomor: LHE-381/PW24/3/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 dan Nomor: IP.057/51/2018 Tanggal 10 September 2018)

1) Tataran Pengambil Kebijakan

Penilaian Indeks Capaian Kinerja dilakukan terhadap tataran pengambil kebijakan yakni kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang penilaiannya dilakukan pada tataran pelaksana kebijakan daerah yakni kinerja satuan kerja perangkat daerah. Tataran pengambil kebijakan terdiri dari 13 aspek

dengan 43 indikator kinerja kunci. Penilaian pada tataran pengambil kebijakan mendapatkan skor 3,0885 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi (ST).

2) Tataran Pelaksana Kebijakan

Tataran pelaksana kebijakan daerah terdiri dari aspek administrasi umum dan urusan pemerintahan. Penilaian pada tataran pelaksana kebijakan daerah mendapatkan skor 2,5391 atau dengan kategori Tinggi (T).

3) Indeks Kesesuaian Materi

Penilaian Indeks Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan Komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci. Hasil Penilaian mendapatkan skor 4,00.

Berdasarkan poin 1, 2 dan 3 diatas maka hasil EPPD di tingkat provinsi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata mendapatkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke 14 dari 21 Kabupaten/Kota dengan skor 2,7687 atau dengan kategori Tinggi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2017.

2. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT Tanggal 04 Mei 2018, Pemerintah Kabupaten Lembata mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi sebesar Rp.42.816.617.848,73 atau 88,57% dari target Rp.48.341.360.073,00 yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah, dengan realisasi sebesar Rp.7.708.446.945,59 atau 79,38% dari target Rp.9.710.863.149,00,
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah, dengan realisasi sebesar Rp.13.960.316.047,00 atau 91,64% dari target Rp.15.234.234.095,00.
 - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan realisasi Rp.5.103.241.414,00 atau mencapai 100% dari target Rp.5.103.241.414,00

- d. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, dengan realisasi sebesar Rp.16.044.613.442,14 atau 87,71% dari target Rp.18.293.021.415,00.
- 2) Dana Perimbangan, dengan realisasi sebesar Rp.609.846.592.558,00 atau 98,70% dari target sebesar Rp.617.868.395.506,00 yang bersumber dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dengan realisasi sebesar Rp.7.626.177.490,00 atau 71,64% dari target Rp.10.644.436.506,00.
 - b. Dana Alokasi Umum, dengan realisasi sebesar Rp.466.007.663.000,00 atau mencapai 100% dari target Rp.466.007.663.000,00.
 - c. Dana Alokasi Khusus, dengan realisasi sebesar Rp.136.212.752.068,00 atau 96,46% dari target Rp.141.216.296.000,00.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan realisasi sebesar Rp.141.224.358.067,00 atau 97,38% dari target Rp.145.030.227.262,00 yang bersumber dari:
 - a. Dana Penyesuaian, dengan realisasi sebesar Rp.114.221.367.400,00 atau 99,78% dari target Rp.114.468.459.000,00;
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, dengan realisasi sebesar Rp.12.768.270.667,00 atau 77,89% dari target Rp.16.415.968.262,00;
 - c. Pendapatan Hibah, dengan realisasi sebesar Rp.14.216.720.000,00 atau 100,50% dari target Rp.14.145.800.000,00.

2. TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018, target Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp.853.893.362.862,00, dimana sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp.787.956.706.391,67 atau sebesar 92,28%. Rincian realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari kelompok Belanja Tidak Langsung dan Kelompok Belanja Langsung, dengan data realisasi yang disajikan dibawah ini masih bersifat sementara yang masing-masing target dan realisasi belanja dari kedua kelompok belanja daerah diruaikan sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.436.210.643.240,00 atau 95,09% dari pagu setelah perubahan sebesar Rp.458.731.507.824,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai, dengan realisasi sebesar Rp.273.020.103.669,00 atau 95,48% dari pagu setelah perubahan sebesar Rp.285.936.456.314,00;
- b. Belanja Hibah, dengan realisasi sebesar Rp.3.965.600.000,00 atau 86,39% dari pagu setelah perubahan sebesar Rp.4.590.600.000,00;

- c. Belanja Bantuan Sosial, dengan realisasi sebesar Rp.226.500.000,00 atau 95,48% dari pagu setelah perubahan sebesar Rp.350.000.000,00;
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dengan realisasi sebesar Rp.1.632.261.383,00 atau 96,71% dari pagu setelah perubahan sebesar Rp.1.687.714.119,00;
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik, dengan realisasi sebesar Rp.157.257.680.400,00 atau 95,50% dari pagu setelah perubahan sebesar Rp.164.666.737.391,00;
- f. Belanja Tidak Terduga, dengan realisasi sebesar Rp.108.497.788,00 atau 7,23% dari pagu setelah perubahan sebesar Rp.1.500.000.000,00.

2) Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung adalah sebesar Rp.351.746.063.151,67 atau 89,01% dari pagu setelah perubahan sebesar Rp.395.161.854.858,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai, dengan realisasi sebesar Rp.32.532.061,158,00 atau 95,24% dari pagu setelah perubahan sebesar Rp.34.157.732.000,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi sebesar Rp.158.585.591.855,00 atau 87,49% dari pagu setelah perubahan sebesar Rp.181.257.817.580,00;
- c. Belanja Modal, dengan realisasi sebesar Rp.160.628.410.138,67 atau 89,36% dari pagu setelah perubahan sebesar Rp.179.746.305.278,00.

Berdasarkan target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp.811.239.982.841,00 dan belanja daerah sebesar Rp.853.893.362.862,00, maka defisit anggaran sebesar Rp.42.653.379.841,00. Pada tanggal 31 Desember 2018 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.793.887.568.473,73 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.787.956.706.391,67, dengan demikian mengalami surplus anggaran sebesar Rp.5.930.862.082,06.

3. TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH

Target dan realisasi pembiayaan daerah sampai dengan 31 Desember 2018 adalah:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah, dengan realisasi Rp.43.439.309.416,16 atau 100,66% dari target Penerimaan Pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD adalah sebesar Rp.43.153.379.841,00, yang bersumber dari:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), dengan realisasi sebesar Rp.43.435.992.416,16 atau 102,65% dari target dalam Perubahan APBD sebesar Rp.43.153.379.841,00;

- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dengan realisasi Rp.3.317.000,00 dari target dalam Perubahan APBD sebesar Rp.0,00.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan realisasi Rp.500.000.000,00 atau 100% dari target dalam Perubahan APBD sebesar Rp.500.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank NTT sebesar Rp.500.000.000,00.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Pembiayaan Netto dari yang ditargetkan sebesar Rp.42.653.379.841,00 terealisasi sebesar Rp.42.939.309.416,16 atau mencapai 100,67%, sehingga dengan kondisi surplus anggaran sebesar Rp.5.930.862.082,06, maka pada tahun 2018 terdapat sisa lebing perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp.48.870.171.498,22.

IV. INOVASI DAERAH

Implementasi Inovasi Daerah dilaksanakan sesuai arahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, maka Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lembata telah menetapkan 15 jenis Inovasi Daerah sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Lembata *"Terwujudnya Lembata Yang Produktif dan Berdaya Saing Untuk Kesejahteraan rakyat Berkelanjutan"* yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017 – 2022 setelah melakukan pemetaan terhadap potensi sesuai kewenangan daerah yang dapat memberikan manfaat bagi daerah atau masyarakat dan mudah untuk direplikasikan oleh organisasi perangkat daerah bersama stakeholder.

Inovasi daerah yang dilaksanakan di tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah antara lain:

1. Dinas Kesehatan

Inovasi yang dilakukan adalah Klinik Primer Desa Berbasis Masyarakat #GOOD Pagi dan Tim Zaber Malaria #Z-MALARIA.

a. #GOOD Pagi

Outcome pelaksanaan inovasi ini adalah meningkatnya kemandirian masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat Lembata yang optimal.

Pelaksanaan #GOOD Pagi melalui 2 (dua) kegiatan yang termuat dalam DPPA T.A. 2018 yakni:

- 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 772.208.100 dengan realisasi sebesar Rp. 694.219.700 dan capaian kinerja kegiatan 75%.

- 2) Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 494.939.500 dengan realisasi sebesar Rp. 410.264.720 dan capaian kinerja 100%

b. #Z-Malaria

Out come pelaksanaan inovasi ini adalah terwujudnya masyarakat hidup sehat dalam lingkungan yang bebas malaria pada tahun 2022 (penurunan angka kejadian malaria dan penurunan tingkat kematian akibat malaria).

Pelaksanaan #Z-Malaria melalui Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit melalui Good Pagi dan Z-Malaria yang dianggarkan dalam DPPA T.A 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.463.626.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.161.573.150 dengan capaian kinerja 100%.

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Rally Wisata Bahari – Lembata #Trully Heaven – Festival Lembata dengan Puncak Event : Festival 3 Gunung (Blue Mountains Tours)

Out come pelaksanaan inovasi ini adalah meningkatnya kunjungan wisata (orang) dan lama menginap (hari).

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan dalam DPPA T.A. 2018 yakni sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.114.603.357 dan realisasi Rp. 1.099.189.594 dengan capaian kinerja 100%.
- 2) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pasar Wisatawan dan Promosi Pariwisata dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.670.758.000 dan realisasi Rp. 1.541.300.518 dengan capaian kinerja 100%.
- 3) Kegiatan Pengembangan Citra Wisata dengan pagu anggaran sebesar Rp. 156.371.950 dan realisasi sebesar Rp. 145.233.201 serta capaian kinerja 100%.

3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (#GESERLANI (Gerakan Seribu Rumah Layak Huni)

Out come pelaksanaan inovasi ini adalah prosentase rumah yang sehat, bersih dan layak huni.

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan dari berbagai sumber yakni DPPA T.A. 2018 yakni Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.186.089.050 dan realisasi Rp. 2.178.656.700 dengan capaian kinerja 80%.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika (**#Studio e-gov**)

Out come dari pelaksanaan inovasi ini adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan melalui pengembangan system *e-gov* (cakupan layanan *e-gov*).

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan dalam DPPA T.A. 2018 dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.773.077.400 dan realisasi Rp. 1.663.062.363 dengan capaian kinerja 100%.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (**Forum Inovasi Anak Lembata #SAYA ANAK PANCASILA, SATU LEMBATA, SATU NTT, SATU INDONESIA**)

Out come dari pelaksanaan inovasi ini adalah meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta meningkatnya kesadaran bela Negara di kalangan generasi muda.

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan dalam DPPA T.A. 2018 dengan Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 173.281.975 dan realisasi Rp. 173.272.665 dengan capaian kinerja 100%.

6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (**#ASN APIIKKK (Aspiratif, Produktif, Inovatif, Integratif, Konkrit, Kontributif dan Kompetitif)**)

Out come dari pelaksanaan inovasi ini adalah presentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat formal dan presentase pejabat Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti diklat struktural.

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan dalam DPPA T.A. 2018 dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 141.316.000 dan realisasi Rp. 104.856.250 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Kegiatan Pendidikan Penjurangan Struktural dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 568.202.400 dan realisasi Rp. 519.500.532 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

7. Sekretariat Daerah (**Peningkatan Sadar Hukum melalui #PTT 151 (Patuh, Taat, Tertib) di 144 Desa dan 7 Kelurahan**)

Out come dari pelaksanaan inovasi ini adalah terbentuknya desa sadar hukum dan terlaksananya penyusunan produk hukum dan pelayanan hukum.

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan dalam DPPA T.A. 2018 dengan Kegiatan Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu Pembentukan Desa Sadar

Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 159.804.300 dan realisasi Rp. 158.719.220 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (**sektor pertanian melalui Gerakan Revolusi Kedaulatan Pangan MELATI MEKAR #t-cabang**)

Out come dari pelaksanaan inovasi ini adalah kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan peningkatan produksi pangan utama (jagung) dan bahan pangan lainnya (cabai dan bawang).

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan dalam DPPA T.A. 2018 dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1) Pelatihan Petani dan Petugas Inovasi t-cabang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.562.900 dan realisasi Rp. 50.562.900 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2) Pembuatan Jalan Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.890.631.200 dan realisasi Rp. 1.810.381.600 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3) Pengelolaan Lahan dan Air dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.975.732.000 dan realisasi Rp. 1.941.539.122 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

4) Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produksi Tanaman Hortikultura (PIK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.647.415.800 dan realisasi Rp. 2.533.655.103 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

5) Optimalisasi dan Ekspansi Lahan Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.039.379.000 dan realisasi Rp. 1.025.384.723 dengan capaian kinerja 100%.

9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (**Gerakan Usahawan 450 #G-U450**)

Out come dari pelaksanaan inovasi ini adalah jumlah usahawan baru yang dibentuk.

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan dalam DPPA T.A. 2018 dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

d. Pengembangan dan Pengelolaan Ikan Teri Desa Hadakewa dan krupuk Ikan Tuna Desa Balauring dengan pagu anggaran sebesar Rp. 363.933.900 dan realisasi Rp. 362.813.900 dengan capaian kinerja 100%.

e. SDM Kreatif dan Vokasi Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 262.993.500 dan realisasi Rp. 206.457.300 dengan capaian kinerja 100%.

f. Expo, Pameran dan Festival dengan pagu anggaran sebesar Rp. 475.705.500 dan realisasi Rp. 444.022.841 dengan capaian kinerja 100%.

PENUTUP

Demikian Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 ini kami sampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Kami menyadari bahwa disamping keberhasilan pencapaian kinerja masih terdapat banyak kekurangan yang belum dapat secara optimal memberikan kepuasan kepada semua pihak, terutama bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lembata. Apa yang telah dicapai sepanjang tahun 2018 merupakan aktualisasi dari hasil kerja keras serta keringat dari semua pihak sebagai bukti pengabdian dan perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat yang telah berpartisipasi aktif, memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Lembata serta permohonan maaf atas berbagai kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Segala kritik, saran dan pemikiran yang baik dari seluruh warga masyarakat sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan restu Lewo Tanah Leu Auq selalu menyertai perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lembata.

Lewoleba, 07 November 2019
BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR, S.T., M.T

